

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, ataupun lembaga (organisasi) yang menjadi pusat perhatian atau saran penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di Bidang UMKM. Untuk ruang lingkup penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. dengan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban dari responden terhadap kuesioner yang disebarkan kepada responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha berskala mikro, kecil dan menengah di Pasar PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pada penelitian ini kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang harus diisi oleh responden yang terdapat pada lampiran 4.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey langsung dengan media kuisioner pada responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan UMKM di Pasar PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pada penelitian ini kuesioner yang di berikan berisi sejumlah pernyataan yang harus diisi oleh responden mengenai Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk mengukur kepatuhan wajib pajak Orang Pibadi yang bergerak di Bidang UMKM.

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial, dengan menggunakan skala lima tingkat yang terdiri dari:

- a) Sangat Setuju (SS) skor 5
- b) Setuju (S) skor 4
- c) Ragu-ragu (R) skor 3
- d) Tidak Setuju (TS) skor 2
- e) Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan usaha UMKM di Pasar PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur. Populasi yang terdaftar di pasar PIK yaitu 600 UMKM. Dan pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik *sampling* yang satuan *sampling*-nya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.

Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM, yang termasuk dalam kategori pengenaan PPh berdasarkan PP 46. Terdapat kriteria Wajib Pajak dalam pengambilan sampel yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap;
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak;
- 3) Memiliki NPWP

Dalam penelitian ini, responden yang termasuk dalam kriteria wajib pajak orang pribadi dalam pengambilan sampel yaitu sebanyak 125 UMKM.

### **3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Dalam bagian operasional variabel ini, penulis mempunyai tiga variabel independen yaitu Insentif Pajak Penghasilan (X1), Sanksi Administrasi Pajak (X2), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3), dengan satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bergerak di Bidang UMKM (Y). Adapun operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Variabel Dependen**

### **a) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

#### **1) Definisi Konseptual**

Menurut Siti Kurnia (2010), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap patuh serta sadar untuk pemenuhan perpajakannya. Hal ini tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham serta berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya.

#### **2) Definisi Operasional**

Pada variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sarunan, Widya (2015), menurutnya dalam kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari indikator:

1. Ketepatan Waktu
2. Penghasilan
3. Sanksi Pengenaan

## **2. Variabel Independen**

### **a) Insentif Pajak Penghasilan**

#### **1) Definisi Konseptual**

Menurut Rachmawati, Nurul Aisyah dan Ramayanti, Rizka (2016) Insentif Pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

#### **2) Definisi Operasional**

Pada variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, Nurul Aisyah dan Ramayanti, Rizka (2016), menurutnya dalam Insentif Pajak Penghasilan dapat dilihat dari indikator:

1. Kemudahan Perhitungan Pajak;
2. Kemudahan Penyetoran PPh;
3. Kemudahan dalam Pelaporan Pajak;

### **b) Sanksi Administrasi Pajak**

#### **1) Definisi Konseptual**

Menurut Nur Aini dan Fidiana (2017), Sanksi administrasi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku yang melakukan perilaku menyimpang.

Dalam buku Perpajakan edisi Revisi karya Prof. Dr Mardiasmo (2011:5) sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar ketentuan yang sifatnya administrasi. Sanksi administrasi ini hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.

## **2) Definisi Operasional**

Pada variabel sanksi administrasi pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Dian Alim Kholifah (2015) menurutnya dalam sanksi administrasi pajak dapat dilihat dari indikator:

1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan

## **c) Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

### **1) Definisi Konseptual**

Menurut Triwigati (2013), Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

## 2) Definisi Operasional

Pada variabel sistem administrasi perpajakan modern menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dalam Widya K Sarunan (2015) menurutnya dalam sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat dari indikator:

1. Implementasi Penatausahaan dan Pelayanan;
2. Prosedur Organisasi Pada Proses Komunikasi;
3. Fasilitas Pelayanan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi.

**Tabel 3.1**

### Operasionalisasi Variabel Penelitian

<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</b> <i>(Indikator berdasarkan Simanjuntak dan Mukhlis (2012))</i>		
<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub-Indikator</b>
Menurut Siti Kurnia (2010), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap patuh serta sadar untuk pemenuhan perpajakannya. Hal ini tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham serta berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan	Aspek Ketepatan Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tanggal penyampaian SPT</li> <li>- Menyampaikan SPT sesuai dengan tanggal yang ditentukan</li> </ul>
	Aspek Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersedia dalam Membayar PPh</li> <li>- Mengisi data SPT tidak sesuai ketentuan</li> <li>- Membayar angsuran pajak terutang</li> </ul>

perundang-undangan perpajakan.	Aspek Pengenaan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran tunggakan lebih dari jatuh tempo</li> <li>- Pengenaan sanksi kepada wajib pajak</li> </ul>
--------------------------------	------------------------	--

<b>Insentif Pajak Penghasilan</b> <i>(Indikator Berdasarkan Nurul Aisyah Rachmawati (2016))</i>		
<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Menurut Rachmawati, Nurul Aisyah dan Ramayanti, Rizka (2016) Insentif Pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.	Kemudahan Perhitungan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan tarif tunggal 1%;</li> <li>- Penerapan omzet sebagai dasar pengenaan pajak;</li> <li>- Perbandingan perhitungan PP 46 dan UU PPh secara umum</li> </ul>
	Kemudahan Penyetoran PPh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan Penyetoran PPh di Kantor Pos;</li> <li>- Kemudahan Penyetoran PPh di Bank;</li> <li>- Kemudahan Penyetoran PPh di ATM;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan karena terdapat beberapa opsi penyetoran PPh</li> </ul>
	Kemudahan dalam Pelaporan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan pelaporan setelah mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara;</li> <li>- Kemudahan pelaporan SPT masa pada PP 46 dibandingkan dengan UU PPh secara umum;</li> <li>- Kemudahan pelaporan SPT tahunan pada PP 46 dibandingkan dengan UU PPh secara umum</li> </ul>

<b>Sanksi Administrasi Pajak</b> <i>(Indikator Berdasarkan Suyanto dan Dian Alim Kholifah (2015))</i>		
<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Menurut Nur Aini dan Fidiana (2017), Sanksi administrasi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau	Denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda keterlambatan Wajib Pajak Kurang Bayar</li> <li>- Denda SPT WP OP</li> <li>- Denda keterlambatan wajib pajak</li> </ul>

menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku yang melakukan perilaku menyimpang.		membayar dan melapor pajak - Penyidikan wajib pajak kurang bayar
	Bunga	- Sanksi administrasi berupa bunga untuk pembetulan SPT 2% - Sanksi karena penundaan pembayaran pajak - Sanksi kekurangan pajak terutang dalam SKPKP dan SPT
	Kenaikan	- Penambahan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak - Ketidakbenaran pengisian SPT

<b>Sistem Administrasi Perpajakan Modern</b> <i>(Indikator Berdasarkan Sari dalam Widya K Sarunan (2015))</i>		
Definisi	Indikator	Sub Indikator
Menurut Triwigati (2013), Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau	Implementasi Penatausahaan dan Pelayanan	- Pelayanan dan pemeriksaan WP - Account Representative (penghubung WP dalam penyampaian informasi)

perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.	Prosedur Organisasi Pada Proses Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian informasi kepada Wajib Pajak</li> <li>- Penjelasan pajak terkait permasalahan pajak dari Wajib Pajak</li> <li>- Pembayaran dan pelaporan pajak</li> </ul>
	Fasilitas Pelayanan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E-system dalam kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan</li> <li>- Pembayaran pajak secara online</li> <li>- Sistem pelaporan pajak elektronik</li> <li>- Complain center</li> </ul>

### 3.6 Uji Hipotesis

#### 3.6.1 Uji Kualitas Data atau Instrumen

##### 3.6.1.1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang harus diukur. Validitas juga bisa dikatakan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010:168). Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisisioner

dengan melihat variabel yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel-variabel ini akan diukur dengan menggunakan instrumen yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya tetapi disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sampel yang akan diuji.

Valid atau tidaknya butir pertanyaan dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan melihat apabila terlihat tanda \*\* yang memperlihatkan signifikansi *Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)*, dan terlihat tanda \* yang memperlihatkan signifikansi *Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)* maka dapat dikatakan bahwa valid.

Salah satu cara untuk menguji validitas yang dikembangkan adalah dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Dengan demikian, apabila perhitungan atau pengujian melalui program SPSS menyatakan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. (Ghozali, 2009:49).

#### 3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten sejauh mana pengukuran dari

suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Uji Reliabilitas sebagai pengujian skor antara item dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliable. Keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan- *error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran,2006:40). Untuk mengukur konsistensi instrumen, maka dilakukan pengujian teknik statistik *Cronbach Alpha* terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari menggunakan instrumen kuesioner dimana tingkat signifikansi sebesar 0,05. Pada uji *Cronbach Alpha*, secara umum keandalan yang kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2009:182). Suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan ( $\alpha \geq 0,6$ ) (Sekaran, 2006:331).

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas data**

Uji normalitas adalah usaha untuk menentukan apakah data variabel yang dimiliki mendekati populasi distribusi normal atau

tidak (Sufrendan Natanael, 2013:65). Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Uji normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti adalah normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov - Smirnov Test*. Kriteria uji normalitas data adalah jika nilai (*probability value / critical value*) > dari tingkat signifikansi  $\alpha$  yang ditentukan yaitu 0,05 (Sufren dan Natanael, 2013:65).

#### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas ini dilihat dari besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan toleransi. Toleransi mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, toleransi yang rendah sama dengan nilai  $VIF = 1/\text{Toleransi}$ . Suatu model regresi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, jika mempunyai  $VIF < 10$  dan mempunyai angka toleransi  $> 0,10$  (Ghozali, 2009:96).

#### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat

lain. Jadi, varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka pernyataan ini disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2009:125). Menurut Santoso (2002:301) deteksi adanya heteroskedastisitas:

1. Nilai probabilitas  $> 0.05$  berarti bebas dari heteroskedastisitas
2. Nilai probabilitas  $< 0.05$  berarti terkena dari heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan grafik *scatterplot*. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik scatterplots antara nilai variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menguji heteroskedastisitas melalui grafik *Scatterplot*, yaitu:

- a) Jika grafik *Scatterplot* menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika grafik *Scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat dikatakan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.2.4 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi linier berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara persial maupun secara bersama-sama.

Regresi linier berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Regresi linier berganda juga memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut Sugiyono, (2013:277), persamaan analisis regresi linier berganda dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana :

Y = Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM

$\alpha$  = Nilai konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel *Insentif Pajak Penghasilan*

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel *Hukuman Administrasi Pajak*

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel *Sistem Administrasi*

*Perpajakan Modern*

X1 = Variabel *Insentif Pajak Penghasilan*

X2 = Variabel *Sanksi Administrasi Pajak*



$X_3$  = Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

$e$  = *Error*

### 3.6.3 Uji Kualitas Model

#### 3.6.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan apakah model yang diuji sudah fit dan layak untuk diteruskan.

Sugiyono (2012:199) mengatakan bahwa Uji F (secara bersama-sama) memiliki tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dengan rumus sebagai berikut:

Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama jika dari hasil uji F, didapatkan nilai signifikan  $< 0,05$ . Dalam pengujian berpengaruh secara bersama-sama variabel bebas dengan variabel terikat, dasar pengambilan keputusan yang dipakai yaitu:

- 1) Apabila nilai signifikan  $< 5\%$  (0,05) atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dinyatakan signifikan, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat;
- 2) Sebaliknya bila nilai signifikan  $> 5\%$  (0,05) atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

### 3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R<sup>2</sup>. Adjusted R<sup>2</sup> ini digunakan sebagaimana variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1.

Jika hasil yang diperoleh  $> 0,5$  maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar angka R<sup>2</sup> maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika angka R<sup>2</sup> semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabel terikat. (Ghozali, 2009:87).

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t ini dimaksudkan untuk menelaah terhadap proses pengambilan data, apakah proses yang dilakukan berdasarkan konsep “acak” (*random*) atau tidak. Adapun maksud dan pengertian dengan uji t adalah melakukan pengujian pada barisan data (sequence) dari nilai median. Uji t (Parsial) adalah uji statistik secara individu /parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, guna

mengukur variabel dominan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi  $t < 5\%$  dan pada tingkat derajat bebas  $df = n - k - 1$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitupun sebaliknya. Maka cara yang dilakukan dengan merumuskan hipotesa:

a) Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

- $H_{a_1}$  : Insentif Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bergerak di Bidang UMKM
- $H_{a_2}$  : Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bergerak di Bidang UMKM
- $H_{a_3}$  : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bergerak di Bidang UMKM